

**MENGOLAH SUMBER DAYA, MENJAGA KUASA : PATRONASE  
POLITIK DI BALIK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN  
KAMPAR**

Zamzam Isnan Nasution\*

**ABSTRAK**

James Scott (1972) mengemukakan bahwa patronase politik lahir akibat adanya hubungan yang tidak seimbang antara patron dan klien yang terangkai dalam sebuah sistem kekuasaan. Patron identik dengan seseorang yang memiliki kekuatan dan menguasai hajat hidup klien, sedangkan klien mempertaruhkan hidup untuk memenuhi kebutuhan patron. Dalam penelitian ini, patronase terjadi pada sebuah sistem dimana di dalamnya terdapat elite ekonomi sebagai patron, dengan elite politik, elite sosial, dan penegak hukum sebagai klien. Menariknya, patronase politik ini sejalan dengan *deforestasi* hutan dan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Patronase politik diterapkan dalam tiga ciri pembeda yaitu ketidaksetaraan, bertatap muka (*face to face*), dan fleksibilitas hubungan. Ciri pembeda ini juga dimanfaatkan oleh elite politik lokal untuk merawat dukungan dan menjaga stabilitas politik serta menopang kebutuhan elite ekonomi. Jurnal ini bertujuan untuk mengupas secara detail pola-pola patronase yang diterapkan di kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar hingga mampu memunculkan sebuah kesimpulan bahwasanya Elite politik lokal menggalang dukungan dan merawat stabilitas politik dengan menggunakan tiga ciri pembeda patronase dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Begitu juga bentuk patronase politik dibalik kebakaran hutan dan lahan cenderung bermodel klien potensial sesuai dengan apa yang dikemukakan James Scott. Hingga sampai pada kesimpulan secara global bahwasanya pembakaran hutan di Kabupaten Kampar terjadi karena adanya keinginan untuk memonopoli aset sumber daya alam kelapa sawit.

Kata Kunci : *Patronase Politik, Kekuasaan, Kebakaran Hutan, Deforestasi, Monopoli*

---

\* Mahasiswa S-1 Program Studi Ilmu Politik, Departemen Politik, Universitas Airlangga.  
[zamzamisnan@gmail.com](mailto:zamzamisnan@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Patronase politik dapat dikatakan menjadi elemen yang sudah melekat dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat dimana banyak terjadi kasus eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Termasuk salah satunya terjadi di Kabupaten Kampar dimana terjadi patronase politik dalam pengelolaan sumber daya hutan yang dimiliki Kabupaten Kampar.

Menilik dari penulisan terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan referensi seperti penulisan Almas Sjafrina dkk di Kutai Barat dan Ketapang<sup>2</sup>, dimana adanya indikasi hubungan patronase-bisnis yang disamarkan melalui gratifikasi pengusaha dengan pemerintahan setempat dalam rangka upaya alih fungsi lahan oleh pengusaha. Hubungan patronase tersebut juga berpengaruh pada pengelolaan APBN di daerah tersebut untuk kepentingan pribadi.

Ada juga jurnal Leo Agustino yang meneliti patronase politik pada pilkada di Jambi dan Takalar yang terjadi pasca Orde Baru. Dengan temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya pola perilaku calon yang akan maju ke Pilkada mencari klien yang sesuai dengan kepentingannya agar mendapatkan suara dari klien-klien mereka. Sedangkan, klien tersebut mencari patron yang berpotensi menang untuk dijadikan alat agar patron tersebut nantinya dapat mendistribusikan kekuasaan pada klien-kliennya yang loyal.<sup>3</sup>

Referensi lain yang dapat menjadi pedoman adalah buku yang ditulis oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati yang menjabarkan tentang Klientilisme dan Patronase berbentuk politik uang dalam Pemilihan umum legislatif di Indonesia.

---

<sup>2</sup>Sjafrina, Almas, dkk. 2013. *Menguras Bumi, Merebut Kursi*. Policy Paper Indonesian Corruption Watch Desember 2013

<sup>3</sup>Agustino, Leo. 2014. *Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi*. Jurnal administrasi public Vol 11 No 2, Oktober 2014.

Dalam buku ini dijelaskan bahwasanya patronase di Indonesia cenderung dalam bentuk *vote buying*, *club goods*, dan *pork barrel politic*.<sup>4</sup>

Selain itu guna mendapatkan potret yang jelas mengenai Patronase di bidang sumber daya alam, penulis juga membaca laporan Sawit Watch yang berjudul *Kebakaran Hutan dan Lahan, Siapa yang Melanggengkan ?*<sup>5</sup> dan Paper Center of International Forestry Research (CIFOR) yang ditulis oleh Luca Tacconi.<sup>6</sup> Keduanya sepakat beranggapan bahwa terjadinya masalah kehutanan terbesar akibat dari adanya permainan dalam penegakan hukum.

Untuk mempertajam analisis penulisan yang akan dibahas, penulis menyederhanakan menjadi dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana elite politik lokal menggalang dukungan dan merawat stabilitas politik, ekonomi, dan sosial dari para aktor dibalik terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar?. Kedua, bagaimana bentuk patronase antar aktor dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar?. Penulisan ini juga menggunakan teori patronase politik James Scott (1972). Dengan temuan yang dihasilkan, diharapkan mampu menyingkap tabir permasalahan patronase politik dalam pengelolaan sumber daya alam dan referensi pengambilan keputusan di Kabupaten Kampar dan daerah lain di Indonesia.

### **Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar**

Peristiwa kebakaran hutan di Riau terjadi akibat maraknya industri kelapa sawit tahun 1990. Kelapa sawit sendiri jauh lebih menghasilkan dibanding ekspor kayu mentah yang sering dipakai pada tahun 1970-1980an. perubahan ini semakin pesat sejak adanya kebijakan dari pemerintah yang melarang adanya ekspor kayu gelondongan dan bahan baku mentah.

---

<sup>4</sup> Aspinall, Edward., dan Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientilisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta : Polgov.

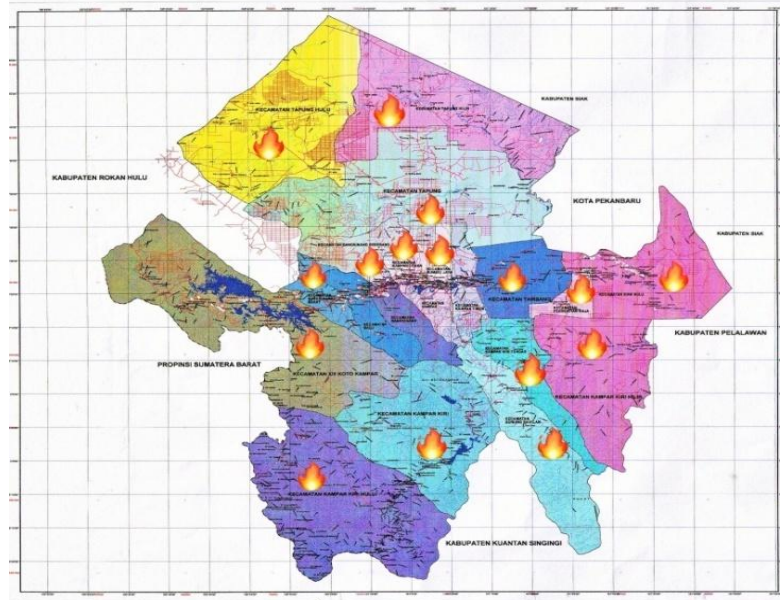
<sup>5</sup> Walhi Riau, Jikalahari, Sawit Watch. 2014. *Kebakaran Hutan dan Lahan, Siapa yang Melanggengkan?*. <http://Sawitwatch.or.id>. Diakses pada 11 Juli 2018 pukul 23.00

<sup>6</sup> Tacconi, Luca. 2003. *Kebakaran Hutan di Indonesia : Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan*. Cifor Occasional Paper No 38(i). Februari 2003.

Perubahan penggunaan kelapa sawit tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan dalam keseimbangan lingkungan. Keuntungan yang besar juga menjadi motivasi utama dalam munculnya pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara dibakar karena biaya yang murah dan efisiensi waktu yang cenderung singkat. Kebakaran hutan pun tak dapat dihindari dan membawa dampak negatif bagi masyarakat dan lumpuhnta perekonomian di Kabupaten Kampar.

Terdapat temuan menarik dalam kebakaran lahan di daerah ini dimana lokasi tersebut bagaikan lingkaran dari bagian timur hingga utara di Bangkinang Selatan. Lokasi tersebut bertepatan dengan tanah perkebunan milik PT Sinar Mas dan PT RAPP yang notabene memiliki ijin resmi dari pemerintah. Hal yang lebih menarik yang menjadi temuan dalam penulisan ini adalah peristiwa ini acapkali terjadi pada lahan sengketa atau tanah perkebunan milik kedua perusahaan tersebut.<sup>7</sup>

Berikut adalah peta lokasi rawan kebakaran di Kabupaten Kampar :



Gambar 1.1. Peta daerah rawan kebakaran hutan di Kabupaten Kampar

---

<sup>7</sup> Nasution, Zamzam. 2018. *Patronase Politik Di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga : Surabaya.

Berdasarkan fakta yang penulis temukan, kebakaran hutan dan lahan mayoritas terjadi di lahan yang memiliki status Konsesi Hak Guna Usaha (HGU), dan Konsesi Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), lahan kawasan konservasi lingkungan, dan jauh lebih banyak lagi pada lahan yang masih belum memiliki status yang jelas atau ilegal.

Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar beranggapan bahwa kebakaran hutan yang terjadi sebanyak 99 persen terjadi bukan karena faktor alam melainkan karena buatan manusia yang disengaja.<sup>8</sup> Kebakaran hutan yang terjadi tentu bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang ingin dicapai seperti lahan yang siap ditanami tanaman menghasilkan yakni kelapa sawit atau kejelasan kedudukan lahan dalam hukum seperti lahan yang masih dalam status moratorium. Kebakaran hutan bukan suatu bencana biasa, harus ditelaah lagi terutama dalam proses interaksi kepentingan di dalamnya.

Untuk mengetahui interaksi kepentingan dalam kasus ini, kebakaran, kita harus menelaah kepentingan yang dibawa masing-masing elite di dalamnya.

### **Elite dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar**

Penulis memotret elite-elite terlibat dari berbagai dimensi berdasarkan kewenangan, tujuan, peranan, dan hubungan yang dimiliki oleh elite tersebut. Elite yang berperan terdiri dari elite politik, elite ekonomi, elite sosial, dan penegak hukum. Identifikasi elite ini diperlukan agar mampu memahami posisi elite yang terlibat dan motivasi yang mendorong terjadinya patronase politik di dalamnya. Selain itu, pemetaan elite juga membantu memudahkan dalam menganalisis lebih dalam lagi.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Santoso S.Pd. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.

Dalam kasus ini, tentu melibatkan elite di ranah politik, termasuk juga pemangku birokrasi ditingkat lokal maupun pusat. Dalam keterkaitan antar elite politik menciptakan sebuah piramida dimana Camat berada di level terbawah. Camat disini bekerja menjaga kegiatan produksi kelapa sawit di daerahnya dapat berjalan dengan lancar baik legal maupun ilegal. Camat secara umum berada di bawah kendali Bupati Kabupaten Kampar yang sedang menjabat. Camat menjadi ujung tombak dalam pengepulan hingga memastikan hasil panen ke tangan elite ekonomi yang memerintah. Camat biasanya memonopoli Tandan Buah Segar (TBS)<sup>9</sup> melalui badan usaha yang dibentuk di daerahnya (umumnya koperasi). Selanjutnya dijual kepada perusahaan bonafit atau diolah sendiri menjadi Crude Palm Oil (CPO)<sup>10</sup> dengan harapan dapat disetor ke perusahaan kelapa sawit yang memiliki harga yang lebih tinggi.

Dilevel kedua terdapat Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi yang memiliki peran penting dalam memantau Rencana Kerja Usaha (RKU)<sup>11</sup> dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)<sup>12</sup>. Proses Pengesahan RKT perusahaan kelapa sawit ataupun perusahaan pengelola hasil hutan lain acap kali menjadi masalah karena sulitnya titik temu antara keinginan *stakeholder* bisnis dan peraturan tentang bagaimana mengelola hutan yang diterapkan di Indonesia khususnya di Kabupaten Kampar. Selalu terjadi *bargaining* antara perusahaan dengan Kepala UPT KPH yang berwenang sehingga RKT dapat segera disahkan.

---

<sup>9</sup>Tandan Buah Segar (TBS) adalah gelondongan hasil panen kelapa sawit mentah yang sama sekali belum diolah

<sup>10</sup> Crude Palm Oil (CPO) adalah minyak kelapa sawit mentah yang perlu diolah kembali sebelum menjadi sebuah produk.

<sup>11</sup> Rencana Kerja Usaha (RKU) adalah rencana kerja usaha selama sepuluh tahun kedepan yang dijadikan dasar pembuatan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

<sup>12</sup>Rencana Kerja Tahunan (RKT)<sup>12</sup>dibuat oleh perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan kelapa sawit selama setahun penuh

Level selanjutnya terdapat peran Bupati sebagai elie yang berkuasa dalam menetapkan dan merubah status lahan, juga menerbitkan izin berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada perusahaan pengelolaan kelapa sawit. Namun disinilah banyak perusahaan yang terkadang berbuat curang bahkan menabrak aturan yang berlaku. Meskipun disadari banyak terdapat kecurangan namun HGU tersebut terus saja disahkan dengan mudah oleh Bupati setempat. Izin yang ditanda tangani selalu sejalan dengan siklus pilkada, bahkan hanya sesaat menjelang masa jabatan Bupati berakhir. Sikap “cuci tangan” seperti ini selalu terjadi setiap periodenya.

Kebijakan Bupati sejalan selalu ditopang dengan kekuatan parlemen Kabupaten Kampar. Kasus kebakaran ini harusnya menjadi sorotan anggota komisi IV DPRD Kabupaten Kampar, namun nyatanya tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas. Selalu lolosnya alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan aspek ekologis adalah buah dari lemahnya pengawasan DPRD. Kurangnya perhatian dari legislatif setempat sudah di ultimatum oleh pemerhati lingkungan yang bisa kita lihat dari tidak sedikitnya tuntutan agar dibuat Rencana Kerja Hutan Syarat (RKHS)<sup>13</sup> di Kabupaten Kampar. Namun, anggota dewan setempat masih bertahan pada *status quo* meskipun mengenyampingkan faktor ekologis di dalamnya.

Realita yang terjadi di lapangan, tidak menutup kemungkinan adanya elite partai yang turut serta menjadi broker dalam banyak hal yang berkaitan antara pihak pebisnis dan pemerintah setempat agar terjadi timbal balik berupa materi saat pemilihan kepala daerah. Praktik yang terjadi lazim disebut “Cukong” yang biasanya berhubungan dengan orang-orang di level atas.

Keterlibatan elite politik dalam bingkai kebakaran hutan dan lahan juga terdapat interaksi dengan pejabat di tingkat provinsi hingga nasional seperti menteri. Biasanya kebijakan di tingkat lokal selalu dilindungi oleh kebijakan di tingkat

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Muslim Ahmad, Koordinator Jikalahari. Pekanbaru, Maret 2018.

provinsi maupun nasional. Namun, untuk lebih memfokuskan topik pembahasan, penulis akan membahas eksekutif lokal saja.

Jika kita mau jujur, peristiwa kebakaran yang selalu terjadi berulang setiap tahun adalah akibat dari penetrasi modal dari perusahaan kelapa sawit. Guna menganalisis siapakah elite ekonomi yang memiliki kuasa dalam menjalankan eksploitasi sumber daya, kita dapat menelusuri hasil kelapa sawit tersebut bermuara.<sup>14</sup> Terdapat temuan menarik dimana hampir seluruh hasil panen kelapa sawit di Kabupaten Kampar mulai dari Tandan Buah Segar (TBS) hingga Clude Palm Oil (CPO) selalu mengarah ke perusahaan yang terafiliasi dengan RAPP Group – Asian Agri yang berada dibawah naungan Asian Pasific Resources Internasional Holdings (APRIL Group) dan PT. Sinar Mas Agro Resources and Teknologi atau yang biasa disebut PT. SMART (Sinarmas Group).<sup>15</sup>

Kedua perusahaan ini menjadi raja yang menguasai seluruh alur produksi kelapa sawit Kabupaten Kampar, bahkan masyarakat yang memiliki ijin pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau koperasi petani setempat menjual hasil kelapa sawitnya kepada Sinarmas Group ataupun April Group. *Income* yang besar mengalir deras ke kas perusahaan berbanding terbalik dengan harga yang didapat masyarakat yang jauh lebih sangat sedikit dibanding nilai ekonomis produk yang dihasilkan pabrik.

Kedua perusahaan yang memonopoli pasar kelapa sawit ini juga memiliki kekuatan dalam membuat masyarakat tergantung pada perusahaan-perusahaan tersebut. Hampir 80 persen masyarakat di Kabupaten Kampar bergantung pada kedua perusahaan tersebut. Perusahaan juga memiliki kemampuan memobilisasi massa guna

---

<sup>14</sup> Eyes On the Forest. 2014. *Harimau Dalam Tangki Mobil Anda ?*. <http://eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/Eyes-on-the-Forest-Laporan-Investigatif-Harimau-di-dalam-tangki-mobilanda>. Diakses Pada 11 Juli 2018 Pukul 20.00.

<sup>15</sup> Nasution, Zamzam. 2018. *Patronase Politik Di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga : Surabaya.



mendukung kepentingannya. penguasaan sumberdaya yang dilakukan oleh PT RAPP dan PT Sinar Mas sama dengan apa yang dikemukakan oleh James Scott (1972). Ia mengatakan bahwa bentuk nyata dalam mensukseskan dan membuat patronase berlangsung lama adalah kuasa atas properti, dalam hal ini penguasaan atas perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber kebakaran hutan oleh dua perusahaan besar tersebut.<sup>16</sup>

Ada juga elite sosial yang ditopang oleh Ninik Mamak (pemangku adat) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (ormas). Elite sosial berperan untuk mengkondisikan masyarakat di level bawah. Dalam praktek-praktek patronase politik, elite sosial adalah seseorang yang memiliki kelebihan dan pengaruh dalam masyarakat yang biasanya berperan sebagai broker dan memiliki kemampuan khusus dalam menyampaikan pesan elite politik atau elite ekonomi pada masyarakat.

Ninik Mamak sendiri dipercaya dalam pengambilan keputusan masyarakat atau mediasi konflik perusahaan pengelola kelapa sawit dengan masyarakat, juga merangkap sebagai agen yang memastikan hasil tanaman masyarakat sampai ke tangan perusahaan relasi. Ninik Mamak memiliki kekuatan penentuan sikap politik masyarakat. Mobilisasi massa juga lazim dilakukan Ninik Mamak yang terafiliasi dengan salah satu calon atau salah satu partai politik.

Elite sosial juga mempengaruhi masyarakat untuk bermitra dengan elite politik maupun elite ekonomi. Banyak ormas juga bekerja menyediakan jaminan keamanan bagi perusahaan di lingkungannya, ataupun LSM yang bertugas menggiring opini yang berpihak pada perusahaan kelapa sawit.

Penegak hukum adalah elite terakhir yang memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan

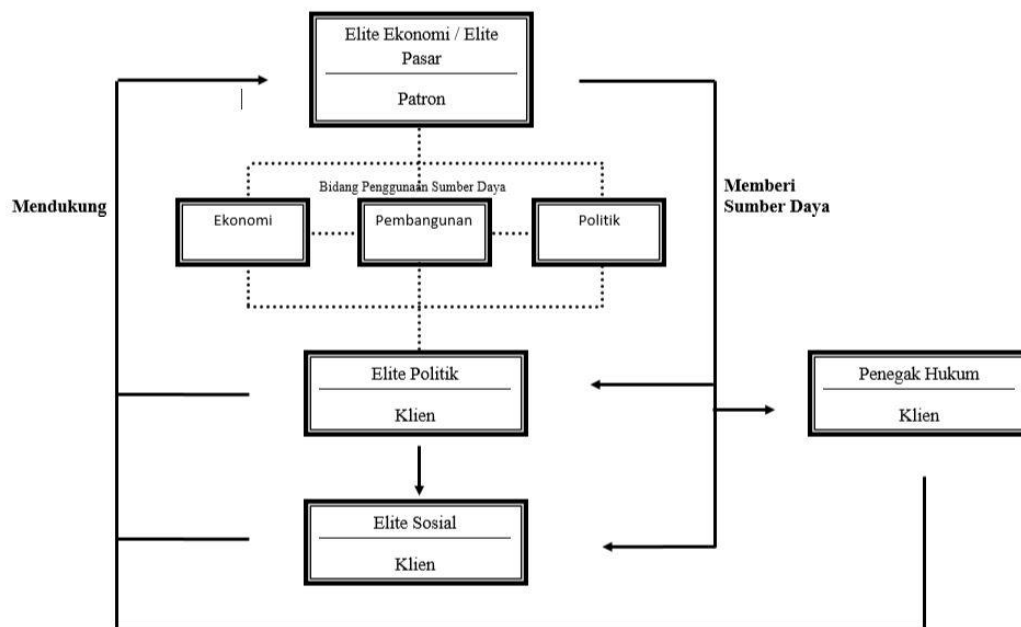
---

<sup>16</sup> Scott, James. 1972. *Patron-Client Politics and Political Change in South East Asia*. Dalam *The American Political Science Review* Vol. 66 No. 1 Hal. 91-113.

dengan sengaja. Kewenangan ini menjadi tanggung jawab Kepolisian Resort Kampar. Namun kritikan tajam selalu meluncur pada SP3 yang sering diberikan Polda Riau terhadap perusahaan pembakar hutan yang sedang bersengketa. Pemberian SP3 ini sudah menjadi rahasia umum dan erat kaitannya dengan dinamika politik dan pasar yang sedang berkembang. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami dalam bagian selanjutnya.

### **Interaksi Antar Elite yang Membentuk Patronase**

Di Kabupaten Kampar patronase dapat terbentuk dari pola interaksi antar aktor. Hubungan pertama erat kaitannya dengan motif ekonomi dimana kebakaran selalu sejalan dengan berjalannya industri kelapa sawit dan kemana produksi itu bermuara. Kedua adalah hubungan dalam perubahan kewilayahan yang erat kaitannya dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dan yang terakhir adalah proses politik yang identik dengan berjalannya pemilukada.



Bagan 1.1. Interaksi antar elite yang membentuk Patronase.

Bagan diatas menjelaskan Interaksi antar elite yang membentuk patronase tersusun dari patron yang dipegang oleh elite ekonomi dengan sumberdaya langkanya berupa modal. Elite ekonomi mengontrol ketiga elite lainnya yaitu elite politik, elite sosial, dan penegak hukum melalui penggunaan modal dalam tiga bidang, yaitu ekonomi, pembangunan kewilayahan, dan politik seperti yang terlihat dalam garis putus-putus.

Interaksi pertama terjadi antara elite ekonomi dengan elite politik. Elite ekonomi yang memiliki sumber daya langka berupa modal memberikan dukungan terhadap elite politik untuk mempersiapkan pemilihan umum kepala daerah, menguasai pasar, dan memberi keuntungan pribadi. Sedangkan elite politik membalas budi elite ekonomi melalui produk kebijakan yang ditelurkan dalam hal politik, ekonomi, serta pembangunan.

Interaksi kedua melibatkan elite ekonomi dengan elite sosial. Elite ekonomi disini memberikan keuntungan pribadi berupa kewenangan untuk membantu mengelola hasil kelapa sawit di level masyarakat yang tentu memberikan keuntungan.

Sebaliknya elite sosial senantiasa menjaga hasil kelapa sawit tersebut hingga pasti masuk pada perusahaan sang elite ekonomi. Selain itu elite sosial juga mempengaruhi perilaku masyarakat agar sesuai dengan pandangan politik elite ekonomi.

Ketiga adalah interaksi antara elite ekonomi dengan kepolisian selaku penegak hukum. Elite ekonomi disini cenderung memberi keuntungan secara pribadi dari hasil yang didapatkan dari perkebunan. Hal ini dipahami oleh penegak hukum dengan memberikan balasan berupa jaminan keamanan terhadap perusahaan kelapa sawit baik legal maupun illegal dan jaminan kemudahan dalam menghadapi berbagai kasus yang menjerat.

Interaksi lain terjadi antara elite politik dengan elite sosial. Posisi elite sosial disini mayoritas bekerja pada elite politik. Elite sosial menjalankan apa yang menjadi kebijakan elite politik agar mampu diterapkan pada masyarakat. Disini juga terjadi timbal balik karena elite politik juga membutuhkan elite sosial dalam hal memobilisasi massa agar dukungan mengalir kepada elite ekonomi dengan balas jasa berupa kewenangan yang dihadiahkan pada elite sosial untuk berekspresi.

### **Menggalang Dukungan Dan Merawat Stabilitas Politik**

Tentu menjadi sebuah bahasan yang menarik apabila kita mendalami mengenai apa yang dilakukan elite politik lokal guna mengumpulkan dukungan dan menjaga stabilitas politik dalam bingkai kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar. Keberhasilan elite politik melanggengkan patronase adalah hasil dari merawat dan memahami konstituennya. Namun sebenarnya bukan perkara mudah dalam memahami konstituen utamanya para elite, namun dengan pendekatan tertentu hal ini sangat mungkin dilakukan.

James Scott (1972) menjelaskan patronase dalam jurnal *Patron – Client Politics and Political Change in South East Asia*. Scott menjabarkan adanya tiga ciri

yang membedakan hubungan patronase dengan hubungan-hubungan lain. Pertama adalah ketidaksetaraan, kedua keharusan bertemu secara tatap muka (*face to face*), dan ketiga tingkat kemudahan dalam hubungan mereka. Ketiga ciri ini harus dilaksanakan dengan sempurna karena erat kaitannya dengan usaha elite politik lokal mencari dukungan serta menjaga stabilitas politik - pemerintahan.<sup>17</sup>

Scott menciptakan teori patronase ini guna memotret fenomena patronase pada masa pra industri di asia tenggara, dan jelas telah berubah seiring berkembangnya zaman. Semakin berkembangnya industri, teknologi informasi, dan globalisasi telah merubah bentuk patronase politik pada saat ini yang mengharuskan untuk mengikuti perkembangan zaman dengan cara yang lebih rasional. Namun tetap pada pondasi utama tersebut.

Pembeda yang pertama adalah posisi patron dan klien yang harus tidak setara. Ada sesuatu yang harus kita pahami bahwasanya modal besar yang dibawa elite ekonomi merubah elite politik dari posisi patron menjadi klien dalam hubungannya dengan elite ekonomi. Namun terhadap elite sosial dan sebagian penegak hukum elite politik tetap mendominasi. Jika dianalisis menggunakan teori Scott, posisi elite politik disini cenderung menyerupai klien potensial karena kemampuan khusus yang dimiliki klien sangat berpengaruh bagi patron dan tidak ada sumberdaya pengganti. Hal ini juga membuat kecenderungan elite politik merangkap sebagai elite ekonomi. Secara tidak langsung akibat hubungan ini tercipta monopoli pasar di wilayah Kabupaten Kampar.

Secara tidak langsung RAPP Group dan Sinar Mas Group selaku perusahaan penguasa mendapatkan wewenang dari elite politik untuk memonopoli pasar kelapa sawit. Hal ini adalah model pertama dalam usaha merawat stabilitas ekonomi oleh

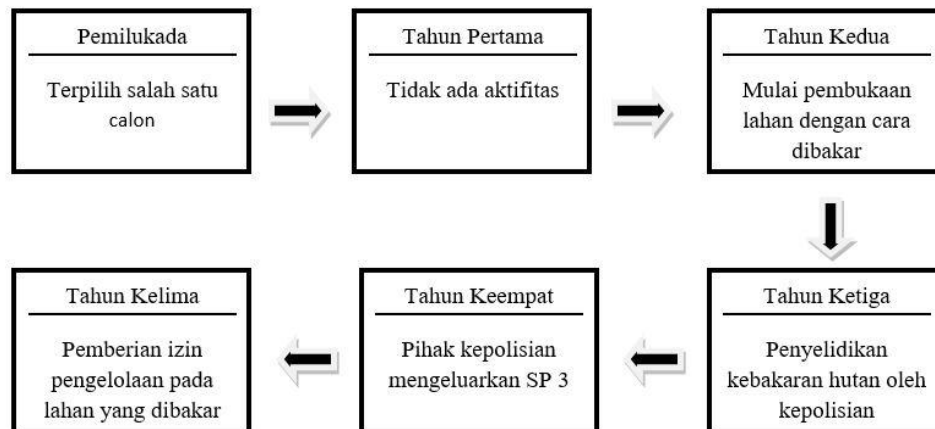
---

<sup>17</sup> Scott, James. 1972. *Patron-Client Politics and Political Change in South East Asia*. Dalam *The American Political Science Review* Vol. 66 No. 1 Hal. 91-113.

elite politik. Pemberian wewenang kepada elite ekonomi dalam menguasai pasar ini bertujuan menekan adanya gejolak ekonomi, sosial, dan politik.

Adanya peluang yang diberikan pada elite ekonomi selaku penguasa industri kelapa sawit menciptakan timbal balik yang berguna bagi elite politik lokal dalam usaha melanggengkan kekuasaannya serta menjaga dukungan politik kepadanya. Elite politik juga mengharapkan adanya dukungan berupa dana yang dapat digunakan untuk berkontestasi dalam pemilu. Selain itu kesepakatan politik yang cenderung menguntungkan elite ekonomi, secara tidak langsung akan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak dibawah kendali elite ekonomi, misalnya karyawan maupun pihak-pihak lain yang untuk termobilisasi memilih calon tersebut.

Ekspansi sumber daya alam juga merupakan salah satu variable dalam menggalang dukungan politik dari elite ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam yang diterbitkan di Kabupaten Kampar. Untuk mempermudah memahami pola-pola kebakaran hutan dan siklus pemberian izin dapat dipahami dalam bagan dibawah ini :



Bagan 1.2. Siklus pemberian izin kebakaran hutan dan pemberian izin pengelolaan

Melalui bagan ini secara jelas menjabarkan alur izin yang diberikan oleh elite politik lokal sebagai cara merawat dukungan dan menggalang dukungan politik dari elite ekonomi. Siklus secara natural terjadi telah terjadi kesepakatan politik antara elite politik dengan elite ekonomi pendukungnya..

Berikutnya terdapat ciri pembeda kedua dalam bentuk patronase yaitu kecenderungan bertatap muka (*face to face*). Seiring banyaknya pertemuan kepentingan elite ekonomi sebagai pendukung utama elite politik akhirnya mempengaruhi kebijakan yang ditelurkan untuk cenderung berpihak pada elite ekonomi. Begitu juga dengan proses perumusan suatu kebijakan, elite politik selalu mengikutsertakan elite ekonomi sebagai pertimbangan. Begitu juga dengan produk kebijakan yang dihasilkan selalu menguntungkan elite ekonomi. Beberapa contohnya mengenai kemudahan perizinan, penetapan status alih fungsi lahan, atau penetapan ongkos kerja murah bagi tenaga kerja lokal. Selain itu juga tertuang dalam peraturan atau kebijakan lain yang cenderung berpihak pada industri elite ekonomi.

Karena munculnya kenyamanan akibat seringnya bertemu antara patron dengan klien, maka secara tidak langsung akan memunculkan ciri pembeda ketiga yaitu bentuk hubungan yang fleksibel. Fleksibel yang dimaksud disini adalah kemudahan antara patron dan klien bekerjasama diluar kontrak formal yang telah disepakati seperti membantu perusahaan untuk mendapatkan simpati masyarakat.

Selain elite ekonomi, elite politik juga merawat stabilitas dan dukungan melalui keterlibatan elite sosial. Seperti memberikan peluang Ninik Mamak mengelola hutan adat ataupun mengikutsertakan LSM dan Ormas dalam pengelolaan hasil kelapa sawit. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi elite sosial merasakan hasilnya secara pribadi. Hal ini dilakukan dengan timbal balik bantuan politik berupa mobilisasi suara dalam pemilukada. Selain itu elite sosial juga membantu elite politik dalam penerapan kebijakan di masyarakat, ataupun peredam

konflik elite dengan masyarakat. Hubungan ini saling dipahami dan terjaga karena ketiga ciri pembeda selalu dipenuhi oleh elite politik dengan baik.

Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan penegak hukum di Kabupaten Kampar umumnya aman tanpa gejolak yang berarti. Apa yang diamati oleh penulis di lapangan, meskipun tidak terikat secara formal, elite politik dan penegak hukum disini saling menjaga peran dan fungsinya masing-masing dalam konteks kebakaran hutan dan lahan ini. Alhasil membentuk kesadaran diantara mereka untuk tidak saling bersinggungan agar dapat merawat sistem yang saling menguntungkan tersebut.

### **Bentuk Patronase Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan**

Scott secara gamblang mengkatagorikan 5 model patronase. Yaitu patronase politik dengan dominasi patron, patronase berbasis klien potensial, keseimbangan antara patron dengan klien, daya tahan (kesinambungan), dan homogenitas (kesamaan).<sup>18</sup> Melihat fenomena yang ada di Kabupaten Kampar, sulit rasanya untuk menentukan bentuk patronase yang sesuai.

Namun ada beberapa poin yang dapat kita gunakan sebagai pijakan. Pertama adalah patron dalam kasus ini adalah Bupati selaku pemerintah daerah setempat. Namun, dalam kenyataannya akibat adanya pengaruh yang kuat dari dua perusahaan besar pengolah kelapa sawit di Kabupaten Kampar yang menguasai seluruh aspek dan juga dukungan politik bagi pemerintah setempat, menyebabkan posisi Bupati tergeser menjadi klien. Maka dapat dipahami bahwa elite ekonomi lebih berkuasa dan mampu memengaruhi *stakeholder* lain.

Selanjutnya jika kita menelaah berdasarkan timeline kebakaran hutan yang terjadi, dapat kita lihat bahwa siklus yang terjadi sejalan dengan adanya emilihan

---

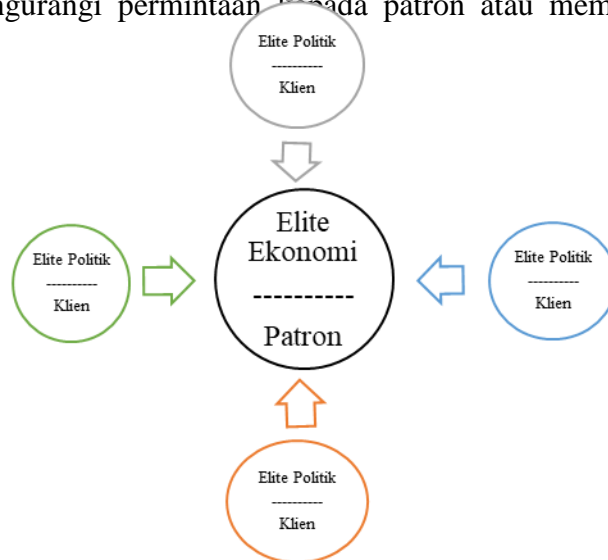
<sup>18</sup> Scott, James. 1972. *Patron-Client Politics and Political Change in South East Asia*. Dalam *The American Political Science Review* Vol. 66 No. 1 Hal. 91-113.



kepala daerah lima tahunan. Banyak elite politik yang memberikan janji-janji kepada elite ekonomi agar dimudahkan dalam proses perijinan dan sebagainya jika terpilih nanti. Elite politik disini setiap menjelang pilkada, menawarkan hal yang sama yakni kemudahan dalam mengoperasikan industri kelapa sawit agar perusahaan-perusahaan besar mampu memonopoli sumber daya alam sekitar.

Scott mengkatagorikan hal tersebut sebagai model patronase basis klien potensial karena klien-klien tersebut memiliki akses kualitas unuk memenuhi kebutuhan patron, maka klien otomatis mengurangi permintaan kepada patron atau memberi sesuatu yang spesial.

seperti ini adalah model patronase berbasis klien potensial, karena terdapat banyak klien yang memiliki kualitas pemenuhan kebutuhan patron yang setara, maka klien otomatis akan mengurangi permintaan kepada patron atau memberi sesuatu yang spesial.



Bagan 1.3. Elite politik berebut pengaruh elite ekonomi.

Bagan di atas menunjukkan bahwa klien potensial, dalam hal ini elite politik berlomba mengambil simpati patron dengan harapan agar nantinya mendapat bantuan finansial dalam mengarugi pilkada. Agar patron tersebut juga mendapatkan keuntungan, patron menerapkan prinsip ekonomi dengan mencari penawaran mana

yang paling membuat dia untung namun dengan biaya yang paling rendah. Alhasil munculah kesepakatan politik rahasia antar individu, Namun lebih spesifik berupa deal-deal politik secara pribadi antar aktor. Sering kali kesepakatan antar aktor dalam satu pasangan calon berbeda.

Tahapan selanjutnya setelah terjadi *deal* antara elite ekonomi dan politik, maka elite ekonomi akan mensupport penuh klien yang berkontestasi dalam pilkada tentunya berupa dukungan finansial dalam jumlah yang besar. Sebagai timbal balik, elite politik sebagai klien jika terpilih nanti berkewajiban memenuhi apa yang dibutuhkan patron. Umumnya berupa dukungan dalam menguasai pengelolaan industri kelapa sawit.

Selain itu, terdapat juga patronase antara elite ekonomi dengan elite sosial dan pengawasan, maupun elite politik dengan elite sosial. Namun melihat posisi elite sosial maupun penegak hukum berada dalam control penuh elite politik dan ekonomi, maka akan tidak seimbang dan hanya menjadi objek eksploitasi berbasis sumber daya.

## **Kesimpulan**

Penulis disini mengambil beberapa kesimpulan dari fenomena elite politik lokal merawat dukungan serta menjaga stabilitas politik. Pertama, elite politik mampu menerapkan tiga ciri pembeda patronase sama persis dengan pendapat yang dikemukakan oleh teoretisi James Scott, yaitu ketidaksetaraan, hubungan tatap muka (*face to face*), dan fleksibilitas hubungan. Sesuai dengan teori, elite politik memposisikan diri sebagai pelayan kebutuhan elite ekonomi, selalu memperhatikan kebutuhan elite ekonomi dalam setiap pengambilan keputusan, juga siap melayani kebutuhan-kebutuhan insidental diluar kesepakatan. Ciri pembeda ini tersalurkan melalui bidang-bidang politik, ekonomi, dan pembangunan.

Selanjutnya jika melihat dari apa saja yang telah di *provide* pemerintah setempat selaku elite politik yang bertindak sebagai klien, kita dapat megkategorikan bahwa patronase yang tersamarkan dalam kasus ini adalah patronase berbasis klien potensial. Klien potensial dalam hal ini elite politik berkompetisi mendapatkan pengaruh elite ekonomi sebagai patron. Tujuannya jelas untuk mendapatkan modal dalam menjalani kontestasi politik maupun terserap sebagai keuntungan pribadi. Sebagai balas budi, nantinya saat calon yang akan maju dalam pilkada telah menduduki jabatannya, maka Ia akan memenuhi keinginan patron.

Akhirnya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil temuan ini adalah bahwa kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kampar, Riau sangat kompleks. Banyaknya interaksi yang terjadi dalam kepentingan industri kelapa sawit secara tidak langsung membentuk sebuah sistem patronase politik. Interaksi ini sejalan dengan *deforestasi* hutan yang dilakukan dengan sengaja yakni dibakar oleh elite ekonomi dengan persetujuan dari elite politik setempat. Hingga, akhirnya penulis membuat suatu simpulan utama bahwa kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Riau khususnya di Kabupaten Kampar disebabkan oleh patronase yang bertujuan untuk terciptanya monopoli pengelolaan kelapa sawit.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Aspinall, Edward., dan Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientilisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta : Polgov.
- Agustino, Leo. 2014. *Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi*. Jurnal administrasi public Vol 11 No 2, Oktober 2014
- Nasution, Zamzam. 2018. *Patronase Politik Di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga : Surabaya.
- Scott, James C. 1972. *Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia*. American Political Science Review 66. Hal 91-113.
- Sjafrina, Almas, dkk. 2013. *Menguras Bumi, Merebut Kursi*. Policy Paper Indonesian Corruption Watch Desember 2013.
- Tacconi, Luca. 2003. *Kebakaran Hutan di Indonesia : Penyebab, Biaya, dan Implikasi Kebijakan*. Cifor Occasional Papper No 38(i). Februari 2003.

### Internet

- Eyes On the Forest. 2014. *Harimau Dalam Tangki Mobil Anda ?*. <http://eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/Eyes-on-the-Forest-Laporan-Investigatif-Harimau-di-dalam-tangki-mobilanda>. Diakses Pada 11 Juli 2018 Pukul 20.00.
- Walhi Riau, Jikalauhari, Sawit Watch. 2014. *Kebakaran Hutan dan Lahan, Siapa yang Melanggengkan?*. <http://Sawitwatch.or.id>. Diakses pada 11 Juli 2018 pukul 23.00